

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka penggunaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.¹ Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain. Berarti dengan kata lain meminjam dari pihak lain yaitu adanya hutang piutang dengan pihak lain bisa bank atau koperasi

Ketika berbicara mengenai utang piutang pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian. Apabila diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih

¹Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2005, hlm. 52

lainnya.” Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.² Selain itu menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Selain pengertian di atas perjanjian sangatlah jelas diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi

²Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 290.

³Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Hal 1.

kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁴

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang

⁴Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 1.

piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.⁵

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (good faith), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibanya maka akan timbul perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini yang terjadi dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Skh, merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Serba Usaha Sari Jaya yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Hendri Ryanto sebagai tergugat I, Tuan Song Siok Lie sebagai Tergugat II, dan Nyonya Indrawati Sei Rahayi sebagai tergugat III. Dalam perkaranya Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum terkait perjanjian pembukaan kredit atau utang piutang yaitu Penggugat sebagai pemberi hutang dan Para Tergugat sebagai yang berhutang dalam beberapa perjanjian hingga jumlah pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp.1.727.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1897 atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No.1217

⁵Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 24 April 2016, Pukul 14.30 WIB.

atas nama Tergugat III, hingga masalah timbul karena menurut Penggugat, Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan harus membayar sisa pinjaman pokok, bunga serta denda sejak wanprestasi hingga gugatan ini diajukan yaitu Tergugat I dan II secara tanggung renteng dengan jumlah keseluruhan Rp. 925.545.512,48 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua belas koma empat puluh delapan rupiah) dan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng dengan jumlah keseluruhan Rp.2.319.827.861,76 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah), selain itu juga harus membayar bunga setiap bulannya sejak gugatan ini diajukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Tergugat I dan II secara tanggung renteng sejumlah Rp.12.636.693,39 (dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah) dan Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng sejumlah Rp.23.605.772,32 (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh dua rupiah);

Pada gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkal dengan mendalilkan bahwa Penggugat memberikan pinjaman total senilai Rp.1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Para Tergugat tidak bisa dibebankan bunga dan denda melebihi ketentuan atau kehendak Penggugat sendiri tanpa pemberitahuan atau persetujuan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat beriktikad untuk menyelesaikan atau menutup perjanjian membuka kredit berdasarkan

perhitungan nilai pokok pinjaman Para Tergugat senilai Rp.1.689.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Pada putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya hukum dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KOPERASI SERBA USAHA SARI JAYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian pada **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN KOPERASI SERBA USAHA SARI JAYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**. Jadi hanya perjanjian hutang piutang. Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya dan bagaimana tanggung jawab hukum jika terjadi masalah perjanjian hutang piutang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang putang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan manfaat tertentu yaitu sesuatu yang di harapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya dan bagaimana tanggung jawab hukum jika terjadi masalah perjanjian hutang piutang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal pemutusan sengketa perjanjian utang putang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya.

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi pada hutang-piutang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi aparat penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian seperti dikemukakan penulis diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan cara dengan menguji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PNSkh, yang dikaji dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Doktrin serta aturan yang bersangkutan. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghlm.ia Indonesia, hal. 160.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.⁷ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji peraturan yang terkait dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Skh, peraturan tersebut seperti KUHPperdata, doktrin, peraturan yang mendukung serta dan pendapat para ahli hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder, adapun jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

⁷ Martin Steinman dan Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung : Angkasa, Hlm.97.

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder:

1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan wanprestasi pada hutang-piutang

2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.

3) Bahan hukum tersier:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum

dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan peraturan secara tertulis yang berkaitan dengan wanprestasi pada hutang piutang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang Tinjauan Umum Perjanjian Utang-piutang yang meliputi Pengertian Perjanjian Utang-piutang, Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang, Perjanjian Kreditur dengan debitur dalam utang-piutang, Hubungan antara kreditur dan debitur, Hak dan kewajiban dalam perjanjian utang-piutangm, Tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi, Ganti Rugi, Kedua Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim yang meliputi pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim, dan yang Tiga Tinjauan Umum Tentang Putusan yang meliputi Pengertian Putusan, macam-macam Putusan, pertimbangan putusan hakim.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya menguraikan tentang penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Skh.yang dianalisis sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdatasehingga terjawabnya bagaimana proses, tanggung jawab dan pertimbangan mengenai perkara pada putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.

Bab IV berisi Penutup yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada analisis data dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.